

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan pendapatan dan kondisi lingkungan. Penduduk miskin banyak dijumpai dilingkungan perkotaan maupun di perdesaan, mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan defenisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hah-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004).

Berdasarkan persoalan yang dihadapi masalah kemiskinan banyak memicu masalah-masalah lainnya seperti terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya (Bappennas, 2004).

Masih dalam Bappennas Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. Di sisi lain kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali memaksa anak dan perempuan untuk bekerja.

Untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan diatas pemerintah daerah juga menjalankan program yang dicanangkan pemerintah pusat diantaranya BLT, Raskin, dan PNPM mandiri. Diantara program tersebut PNPM mandiri merupakan salah satu program yang mengajak masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan. Diantaranya terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

PNPM Mandiri merupakan acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bagian dari program PNPM mandiri yang lebih berkontribusi kepada masyarakat miskin yang sulit terjangkau oleh pemerintah secara langsung yang berada pada daerah perdesaan yaitu PNPM mandiri perdesaan (Departemen Dalam Negeri, 2009).

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan mampu bekerjasama dalam kegiatan yang dibentuk oleh PNPM Mandiri Perdesaan, salah

satunya bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) kepada masyarakat, sebesar Rp1 Miliar sampai Rp 3 miliar perkecamatan, tergantung jumlah penduduk. Program ini dilakukan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup diantaranya kegiatan dana pinjaman bergulir melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan untuk kemandirian masyarakat di perdesaan (Departemen Dalam Negeri, 2009).

PNPM mandiri merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berlansung sejak tahun 1998-2007, namun pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang masih menggunakan prosedur dari kelanjutan program PPK, yang merupakan salah satu program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa (Departemen Dalam Negeri, 2009).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan Penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan program PNPM antara lain pada Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Nagari/Desa (BKAN/D), Lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK), Pendamping Lokal(PL), Tim Penggerak PKK dan Dokumen PPD yang ada dilevel Kabupaten. Untuk itu diadakan Penilaian

terhadap pelaku Kabupaten, yang dinilai berhasil dalam perkembangan pelaksanaan program PNPM-MP (<http://PNPM-Sumbar>)

Kabupaten Solok adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memperoleh peringkat kedua dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dan peringkat pertama PNPM-MP integrasi tingkat Sumatera Barat untuk pelaksanaan tahun 2013 yang melaksanakan berbagai kegiatan baik di bidang fisik maupun nonfisik. Adapun dari seluruh nagari yang ada di Kabupaten Solok (sumber) salah satu nagari yang menerima bantuan dari PNPM ialah Nagari Bukik Kandung, pelaksanaan PNPM di Nagari Bukik Kandung sudah berlangsung dari tahun 2002 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merealisasikan bantuan berupa bantuan fisik seperti perbaikan sarana dan prasarana diantaranya perbaikan pasar, perbaikan jalan, serta perbaikan sekolah hingga tahun berikutnya terdapat perkembangan dari tahun ketahun dari program PPK (Realisasi Anggaran Dana PNPM, 2012). Namun ada tahun 2005 PPK merealisasikan dana bantuan berupa bantuan fisik dan non fisik diantaranya perbaikan sarana prasarana, pengadaan pelatihan kepada masyarakat, perbaikan jalan, perbaikan sekolah, serta bantuan non fisik berupa bantuan pendanaan dalam bentuk dana bergulir dengan bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) (Departemen Dalam Negeri, 2009).

Nagari Bukik Kandung terpilih sebagai pelaksanaan program PNPM karena di Nagari Bukik Kandung banyak terdapat rumah tangga miskin yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Nagari Bukik Kandung Kab. Solok
Tahun 2006-2012**

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah KK	RTM (KK)	%
		Lk	Pr				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2006	1322	1416	2738	752	256	34,0
2	2007	1.405	1.326	2731	743	241	32,4
3	2008	1352	1386	2738	685	246	35,9
4	2009	1316	1407	2723	779	246	31,5
5	2010	1081	1081	2162	606	247	40,7
6	2011	1320	1407	2727	630	322	51,1
7	2012	1565	1594	3159	790	329	41,6

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan X Koto Diatas Tahun 2013 (Data Diolah)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2006 persentase penduduk miskin adalah 34,0% , pada tahun 2007 persentase penduduk miskin adalah 32,4%, ini berarti terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,6%, karna pada tahun tersebut program PNPM sedang berkembang sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan di nagari bukik kanduang menurun Namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun di Nagari Bukik Kandung.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui dampak PNPM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Nagari Bukik Kandung yang berjudul **Analisis Dampak Program PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Nagari Bukik Kandung Kab. Solok.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata produksi, rata-rata tenaga kerja, rata-rata pendapatan anggota masyarakat miskin yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dari PNPM-MP?
2. Apakah terdapat peningkatan rata-rata produksi, rata-rata tenaga kerja, rata-rata pendapatan anggota masyarakat miskin yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dari PNPM-MP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produksi, rata-rata tenaga kerja, rata-rata pendapatan anggota masyarakat miskin yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dari PNPM-MP?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan rata-rata produksi, rata-rata tenaga kerja, rata-rata pendapatan anggota masyarakat miskin yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dari PNPM-MP?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi.
2. Bagi penulis penelitian ini sebagai bahan acuan bagi penulis dan pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang topik dan masalah yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program PNPM terhadap jumlah produksi, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat dari anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Nagari Bukik Kandung Kab. Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner dan wawancara langsung.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengklasifikasikan penulisan agar lebih jelas dengan memberi batasan-batasan sesuai dengan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan, teori pemberdayaan masyarakat, program PNPM, PNPM-MP, kemiskinan, produksi, tenaga kerja, teori pendapatan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah penelitian, karakteristik responden.

BAB V : ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Analisis data untuk pengujian hipotesis, serta pembahasan atas hasil analisis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.